

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, dan jasa serta risiko kedepan:

Hasil penghitungan indeks perkembangan harga (IPH) 20 komoditas pangan selama bulan April 2024 menunjukkan **penurunan** harga sebesar **2,09** persen dibanding bulan Maret 2024. Komoditas yang memberikan andil terhadap penurunan IPH April 2024 adalah beras, cabai rawit, dan cabai merah. Sementara komoditi yang mengalami fluktuasi harga tertinggi selama April 2024 adalah bawang merah.

Hasil penghitungan indeks perkembangan harga (IPH) 20 komoditas pangan selama bulan Mei 2024 masih menunjukkan **penurunan** harga yaitu sebesar **2,30** persen dibanding bulan April 2024. Komoditas yang memberikan andil terhadap penurunan IPH Mei 2024 adalah beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sementara komoditi yang mengalami fluktuasi harga tertinggi selama Mei 2024 adalah masih bawang merah.

Hasil penghitungan indeks perkembangan harga (IPH) 20 komoditas pangan selama bulan Juni 2024 masih menunjukkan **penurunan** harga yaitu sebesar **0,33** persen dibanding bulan Mei 2024. Komoditas yang memberikan andil terhadap penurunan IPH Juni 2024 adalah bawang merah, gula pasir, dan bawang putih. Sementara komoditi yang mengalami fluktuasi harga tertinggi selama Juni 2024 adalah bawang putih dan cabai merah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah:

1. Ketersediaan pasokan komoditas pangan bisa dipengaruhi dari perubahan cuaca ekstrim dan alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengakibatkan menurunnya produksi pangan lokal.
2. Keterjangkauan harga sangat dipengaruhi oleh gejolak harga atau fluktuasi harga komoditas terutama menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru yang memiliki kecenderungan harga-harga komoditas mengalami kenaikan.
3. Kelancaran distribusi komoditas pangan khususnya yang bukan produksi lokal sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.
4. Masih ada kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara lain Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi belum Optimal.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Mengikuti rakor TPID Kab Way Kanan yang dilaksanakan awal minggu.
2. Penyediaan data Indeks Perkembangan Harga.
3. Melaksanakan Kegiatan Monitoring Harga Bahan Pokok.
4. Melaksanakan proses pengusulan bantuan benih padi dan pendampingan/pembinaan

gerakan tanam padi sebagai upaya peningkatan produksi padi untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Way Kanan.

5. Melaksanakan Gerdal Hama (Gerakan Pengendalian Hama) yang dilakukan sebagai upaya pengendalian terhadap hama dan penyakit pada tanaman padi sebagai upaya meningkatkan produksi padi, serta pemberian bantuan obat hama penyakit tanaman.
6. Melaksanakan pendampingan kepada kelompok tani dan KWT untuk gerakan menanam cabai baik di lahan pertanian maupun melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
7. Melakukan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi.
8. Melakukan Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bersama Wakil Bupati Way Kanan kepada Stakeholder Terkait diantaranya Distributor, Kios Pupuk, Tim Verval, Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani
9. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jalan sebagai upaya untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi bahan pokok atau bahan makanan lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya dan ongkos distribusi menjadi murah sehingga mempengaruhi harga bahan pokok di masyarakat Kabupaten Way Kanan di tahun 2024 menjadi lebih murah dan stabil.
10. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan semisal dari jalan onderlagh menjadi lapen atau jalan lapen menjadi hotmix sebagai upaya untuk mempercepat kegiatan distribusi bahan pokok atau bahan makanan lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya dan ongkos distribusi menjadi murah sehingga mempengaruhi harga bahan pokok di masyarakat Kabupaten Way Kanan di tahun 2024 menjadi lebih murah dan stabil.
11. Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jalan semisal kegiatan penambalan jalan - jalan berlubang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan dalam kegiatan distribusi bahan pokok dan memperlancar kegiatan distribusi bahan pokok atau bahan makanan lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya dan ongkos distribusi menjadi murah sehingga mempengaruhi harga bahan pokok di masyarakat Kabupaten Way Kanan di tahun 2024 menjadi lebih murah dan stabil.
12. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jalan sebagai upaya untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi bahan pokok atau bahan makanan lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya dan ongkos distribusi menjadi murah sehingga mempengaruhi harga bahan pokok di masyarakat Kabupaten Way Kanan di tahun 2024 menjadi lebih murah dan stabil.
13. Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kampung Tanjung serupa Kecamatan Pakuan Ratu dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 Lokasi GPM dilaksanakan di Halaman Balai Kampung Tanjung Serupa. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin ekstrem dan stunting yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

Dengan 9 komoditas yaitu :

No	Nama Mitra	Pangan yang Dijual	Vol (kg)
1	Bulog	Beras SPHP	8000
2	Bulog	Minyak Goreng	500
3	PSMI	Gula Pasir	500
4	Wiwit	Telur	250
5	Sugeng	Cabai Merah	50
6	Sugeng	Cabai Rawit	50
7	Sugeng	Bawang Merah	100
8	Sugeng	Bawang Putih	100
9	H. Heri	Beras Premium	500

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemantauan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang berkelanjutan
2. Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga komoditas pangan.
3. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan melalui petugas yang ada di kecamatan.
4. Adanya dukungan sarana pendukung agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif.
5. Melaksanakan koordinasi agar kegiatan dapat terlaksana dan berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.